

HAMBATAN PENYELESAIAN SENGKETA WILAYAH PERBATASAN KEPULAUAN KURIL

Muhammad Irfan Akbar¹

Abstract: *The Research aims to identify the obstacles in resolving the territorial dispute over the Southern Kuril Islands. The author designed the research using qualitative data from both primary and secondary sources, analyzed through descriptive research methods to effectively address the research questions.*

The findings indicate that the impediments in this territorial conflict include the issue not being brought to arbitration and the involvement of foreign parties. Additional factors were identified upon further examination from the countries' perspectives and their populations: differences in the basis of claims, national interests such as the contest for natural resources, and a sense of ownership by the respective communities in both countries. These factors contribute to the unresolved territorial dispute between Japan and Russia over the Southern Kurils.

Keywords: *Territorial Dispute, Conflict Resolution, Kuril*

Pendahuluan

Negara-negara yang berdekatan dan berbatasan langsung secara geografis memungkinkan terjadinya interaksi terkait batas teritorial. Interaksi ini dapat menyebabkan perselisihan atau tuntutan pengakuan atas wilayah tertentu. Hal ini disebabkan oleh pentingnya batas teritorial yang dapat menentukan keuntungan strategis dan ekonomis suatu negara, yang pada akhirnya mempengaruhi posisinya dalam hubungan internasional. Karena dianggap signifikan, maka penguasaan atau sengketa wilayah dapat dilihat sebagai upaya untuk memperluas kekuasaan sebuah negara (Emmers, 2010).

Sengketa wilayah adalah isu dalam hubungan internasional yang mampu diselesaikan dengan cara damai, seperti negosiasi antara pihak yang terlibat ataupun melalui pengadilan internasional, selain itu penyelesaian juga bisa melibatkan kekerasan dengan penggunaan kekuatan militer (Huala, 2020:1). Baik cara damai dan kekerasan umumnya dapat memberikan hasil konkrit dari suatu permasalahan sengketa, namun terdapat kasus dimana sengketa tidak menemui jalan akhir dan menjadi berlarut-larut seperti yang terjadi antara Jepang dan Rusia. Kedua negara tersebut memiliki perbatasan di dua wilayah, yaitu Pulau Sakhalin dan Kepulauan Kuril, dimana kedua teritori tersebut merupakan wilayah kedaulatan Rusia, namun Jepang tidak mengakui kepemilikan Rusia terhadap wilayah selatan di Kepulauan Kuril (Rapry, 2014).

Secara keseluruhan, Kepulauan Kuril terdiri dari 56 pulau yang terletak di antara utara Hokkaido, Jepang, dan selatan Semenanjung Kamchatka, Rusia, serta diapit oleh Samudera Pasifik Utara dan Laut Okhotsk. Dari 56 pulau tersebut, Jepang mengklaim empat pulau: Kunashiri, Shikotan, Etorofu, dan Habomai, yang oleh Rusia disebut sebagai Kuril Selatan dan oleh Jepang disebut sebagai Wilayah Utara. Kuril Selatan sendiri merupakan wilayah Jepang, namun setelah berakhirnya Perang Dunia II kepemilikan empat pulau tersebut berpindah kepada Rusia (Brown, 2016).

Upaya-upaya telah dilakukan oleh kedua negara dalam menyelesaikan konflik wilayah baik melalui pertemuan ataupun perjanjian seperti Deklarasi Bersama tahun

¹ Mahasiswa Program S1 Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. E-mail : irfanakbar18011999@gmail.com.

1956, namun pembicaraan mengenai Kepulauan Kuril Selatan yang sebelumnya berlangsung secara kooperatif antara Rusia dan Jepang secara tiba-tiba terhenti yang ditandai dengan memburuknya hubungan diplomatik kedua negara. Pada 21 Maret 2022, Rusia yang diwakilkan oleh menteri luar negerinya mengumumkan akan menghentikan segala bentuk pembicaraan, kerja sama, dan negosiasi damai terkait empat pulau Kuril Selatan yang tengah menjadi sengketa dengan Jepang sejak akhir Perang Dunia II (The Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation, 2022). Hal ini sejalan dengan pernyataan pihak Jepang di bulan yang sama, dimana mereka berpendapat bahwa negara sedang tidak dalam keadaan yang memungkinkan untuk membahas wilayah kedaulatan mereka, yaitu Kuril Selatan (Ministry of Foreign Affairs of Japan, 2022). Upaya penyelesaian sengketa wilayah Kuril resmi terhenti sebagaimana yang bisa dilihat pada pernyataan kedua perwakilan negara dan hingga tahun 2022 berakhir, tidak ada kemajuan dalam pembicaraan mengenai Kepulauan Kuril Selatan.

Fenomena Sengketa yang telah berlangsung dalam jangka waktu puluhan tahun dihitung sejak pengambilalihan Kuril oleh Rusia pada 1945 hingga saat terbitnya pernyataan sikap kedua negara pada tahun 2022, serta telah diberlakukannya negosiasi dan kerjasama terkait Kepulauan Kuril Selatan memunculkan pertanyaan tentang apa yang menjadi hambatan oleh Rusia dan Jepang dalam menyelesaikan konflik wilayah perbatasan.

Kerangka Teori

Penelitian ini menggunakan Teori Resolusi Konflik sebagai upaya untuk menggambarkan Hambatan Penyelesaian Sengketa Wilayah Perbatasan Kepulauan Kuril.

Teori Resolusi Konflik

Para ahli mendefinisikan Resolusi Konflik dengan berbagai macam pengertian, salah satunya yaitu John Burton yang berpendapat bahwa Resolusi Konflik adalah suatu cara yang memprioritaskan metode non-kekerasan di antara pihak-pihak yang berkonflik, dengan tujuan untuk mengurangi masalah potensial dan menyelesaikan penyebab mendasar dari konflik tersebut (Ihsan, 2014). Resolusi konflik juga bisa merujuk pada upaya untuk menurunkan intensitas kekerasan dalam konflik. Meskipun pihak-pihak yang terlibat masih berada dalam situasi konflik, mereka mengadopsi cara yang kurang agresif dibanding sebelumnya, seperti menghentikan penggunaan kekuatan militer. Proses pengurangan intensitas konflik ini dapat melibatkan pihak ketiga sebagai mediator untuk mencapai kesepakatan mengenai pengurangan atau penghentian konflik tersebut (Knoop, 2014).

Jeong Ho Won berpendapat bahwa Resolusi Konflik bertujuan untuk mengatasi akar penyebab masalah dan tidak hanya menangani masalah-masalah di permukaan. Dengan demikian, upaya penyelesaian dapat mencegah timbulnya kembali masalah yang sama di masa mendatang, yang mungkin muncul dari penyelesaian sementara. Hal ini bisa tercapai jika pihak-pihak yang berkonflik bersedia berkompromi untuk mencapai penyelesaian yang tuntas (Jeong, 2010). Dari pendapat-pendapat diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa Resolusi Konflik membutuhkan penanganan terhadap akar dari suatu masalah melalui kompromi oleh aktor yang terlibat agar konflik tidak berlarut-larut ataupun menyebabkan masalah lainnya.

Teori Resolusi Konflik memiliki dua cara penyelesaian yang salah satunya adalah melalui cara kekerasan, namun cara ini dianggap tidak efektif karena dibutuhkan kompromi antar negara yang berseteru untuk mencapai resolusi menyeluruh, untuk itu

sebuah masalah akan diselesaikan melalui cara damai, yang menurut Merrills memiliki dua metode, yaitu (Evans, 2003):

a. Metode Diplomasi.

Pendekatan ini mencakup negosiasi langsung antara pihak bersengketa tanpa pihak ketiga, mediasi dengan pihak ketiga netral sebagai penengah, inquiry atau penyelidikan oleh pihak ketiga untuk mengumpulkan fakta, serta konsiliasi yang melibatkan pihak ketiga untuk memberikan saran dan rekomendasi.

b. Metode Arbitrase.

Pihak yang bersengketa melibatkan pihak ketiga untuk membuat keputusan yang mengikat, seperti yang dilakukan oleh Mahkamah Internasional (ICJ) dan pengadilan internasional lainnya, yang menghasilkan keputusan berdasarkan hukum internasional.

Baik cara damai ataupun kekerasan tetap dapat berakhir pada tidak tercapainya penyelesaian dalam suatu resolusi konflik, Johan Galtung menyebutkan bahwa terdapat dua indikator untuk melihat dan memahami mengapa resolusi konflik tidak dapat tercapai, dua hal tersebut adalah (Aji dan Indrawan, 2019):

a. Kondisi Objektif (*state level*).

Kepentingan nasional, persaingan atas sumber daya ekonomi, dan kedaulatan wilayah berbeda-beda bagi setiap negara. Negara satu dan yang lain menganggap bahwa kepentingan mereka adalah mutlak dan tidak bisa diganggu gugat, namun jika semua negara memiliki pandangan seperti ini akan muncul perselisihan dalam isu-isu tertentu. Demikian pula, persaingan atas sumber daya alam dan klaim terhadap wilayah dapat menjadi hambatan utama dalam penyelesaian konflik antar negara.

b. Kondisi Subjektif (*Community Level*).

Kondisi ini merujuk pada Hubungan yang tidak setara antara masyarakat dan pemerintah, yang mencakup faktor-faktor seperti sejarah, kelompok etnis, wilayah, institusi politik, dan sumber daya alam, dapat mempengaruhi proses penyelesaian konflik. Sejarah membantu mengidentifikasi akar masalah dan dinamika sosial, etnisitas membentuk identitas dan interaksi antar kelompok, wilayah dan kepentingan politik dapat menyebabkan perbedaan antara kebijakan negara dan aspirasi masyarakat, sementara sumber daya alam dapat menjadi salah satu penyebab ketidaksetaraan.

Faktor penghambat lainnya dalam resolusi konflik disebutkan oleh Adolf Huala bahwa suatu perkara tidak dapat diselesaikan oleh pengadilan internasional apabila negara-negara tidak membawa permasalahan tersebut ke lembaga peradilan (Huala, 2020:4), walaupun pihak ketiga mampu menjadi penyelesai dalam konflik, penghadiran pihak ketiga sebagai penengah dapat menjadi penghambat apabila pihak tersebut memiliki kepentingan yang dapat merugikan pihak lainnya (Gent & Shannon, 2011).

Metode

a. Jenis Penelitian.

Penelitian dilakukan dengan metode deskriptif untuk menggambarkan Hambatan Penyelesaian Sengketa Wilayah Perbatasan Kepulauan Kuril.

b. Jenis Data.

Data-data yang digunakan berasal dari sumber primer dan sekunder. Sumber primer, berupa halaman web resmi pemerintah Jepang dan Rusia yang memuat pernyataan-pernyataan kedua negara, sedangkan sumber sekunder didapatkan dari artikel, skripsi, jurnal, dan buku yang terkait dengan topik penelitian.

c. Teknik Pengumpulan Data.

Studi Kepustakaan atau *Library Research* dimana peneliti menggunakan data-data empiris yang terkait fenomena yang diteliti.

d. Teknik Analisis Data.

Pengumpulan data-data kualitatif, kemudian diolah untuk menggambarkan dan menjawab permasalahan melalui teks naratif yang teratur dan terurut.

Hasil dan Pembahasan

Sengketa Kepulauan Kuril Selatan

Untuk memahami sengketa yang ada antara Jepang dan Rusia, maka perlu dilihat dan ditelusuri secara historis tentang konflik yang ada antara kedua negara tersebut, terutama yang terkait dengan Kuril Selatan. Kemudian secara umum terdapat dua pembagian waktu konflik, yaitu periode dan sebelum Perang Dunia II.

a. Sengketa Kuril Sebelum Perang Dunia II

Pergerakan Jepang untuk menguasai Kuril Selatan pertama kali terjadi pada tahun 1798, dengan mendirikan pos di Pulau Urup dan memerintahkan Suku Ainu di Kuril Selatan agar membayar pajak serta melarang mereka berdagang dengan pihak asing. Pada tahun 1805, Rusia melakukan usaha negosiasi dengan Jepang mengenai larangan perdagangan dengan Ainu, tetapi negosiasi ini gagal dan Rusia dilarang berdagang di wilayah Jepang. Mengabaikan larangan Jepang, Rusia tetap pergi ke Kuril dan membakar bangunan-bangunan Jepang di Pulau Urup. Jepang kemudian menangkap kapten kapal Rusia, Golovnin, dan menahannya selama dua tahun sebelum akhirnya melepaskannya kembali ke Rusia (Kurilsky Nature Reserve, 2006).

Pasca insiden tahun 1805, Rusia dan Jepang menjalin beberapa perjanjian terkait dengan wilayah. Kuril juga menjadi salah satu pembahasan yang dapat dilihat diberbagai perjanjian. Perjanjian pertama yang mengatur terkait wilayah kedua negara tersebut adalah Perjanjian Shimoda tahun 1855, yang mengatur tentang perbatasan. Disetujui bahwa Rusia memperoleh Pulau Urup dan Jepang mendapatkan Pulau Kuril Selatan, yaitu Etorofu, Kunashiri, Shikotan, dan Habomai. Perjanjian ini juga membahas bahwa Pulau Sakhalin akan dimiliki bersama (Ministry of Foreign Affairs of Japan, 2001). Setelah Shimoda, terdapat Perjanjian St. Petersburg tahun 1875 yang mengatur pertukaran wilayah antara Jepang dan Rusia: Sakhalin, yang telah diatur bersama sejak tahun 1855, sepenuhnya diserahkan kepada Rusia, sedangkan Jepang memperoleh tambahan 18 pulau di Kuril yang sebelumnya dimiliki oleh Rusia (Presidential Library, 2024). Jepang sendiri berhasil menguasai setengah dari Sakhalin pada Perjanjian Portsmouth 1905 sebagai akibat dari kalahnya Rusia dalam Perang yang memperebutkan Manchuria (Jukes, 2002).

Perjanjian-perjanjian yang telah disebutkan kemudian menjadi tidak berlaku saat diadakannya Perjanjian Yalta tahun 1945 antara Rusia dan Pasukan Sekutu. Perjanjian ini berisi tentang undangan Pasukan Sekutu terhadap Rusia untuk menyerang Jepang,

dan setelahnya Rusia akan diberikan wilayah yang telah di rampas oleh Jepang, termasuk Sakhalin dan Kuril (CVCE, 2015). Kuril Selatan kemudian berhasil dikuasai oleh Rusia pada saat berakhirnya Perang Dunia II.

b. Sengketa Kuril Pasca Perang Dunia II

Setelah Perang Dunia II, meskipun Jepang dan Rusia tidak lagi terlibat dalam konflik militer, sengketa wilayah tetap berjalan. Sejak pendudukan Kuril Selatan yang dilakukan Rusia, peta wilayah dan kepemilikan empat pulau di Kuril tersebut tidak pernah mengalami perubahan, tetapi upaya untuk menyelesaikan konflik terus berlanjut. Pada tahun 1951, Perjanjian San Francisco ditandatangani oleh 49 negara, termasuk Jepang, yang mengatur tanggung jawab biaya dan wilayah terdampak perang. Salah satu poin dalam perjanjian ini, yang tercantum dalam Pasal 2 C, meminta Jepang untuk menghentikan semua klaim terhadap Kepulauan Kuril dan wilayah lainnya yang diperoleh melalui Perjanjian Portsmouth 1905. Pasal tersebut juga diperjelas dan ditambah dengan pernyataan bahwa Pulau Habomai dan Shikotan termasuk dalam Distrik Hokkaido, Jepang. Uni Soviet, yang menduduki empat pulau di Kuril Selatan termasuk dua area yang disebutkan pada pasal tersebut, tidak menandatangani perjanjian ini (Zolotaryova & Yessengaliyeva, 2013:273).

Ketidakpastian Kepemilikan Kuril Selatan berujung pada upaya resolusi yang diadakan oleh Rusia-Jepang pada peristiwa Deklarasi Bersama tahun 1956 dimana perjanjian perdamaian mulai didiskusikan karena kedua negara belum secara resmi berdamai sejak adanya perang pada tahun 1945. Perjanjian damai mencakup kesepakatan bahwa Uni Soviet akan mengembalikan Pulau Habomai dan Shikotan, yang mereka kuasai selama Perang Dunia II setelah perjanjian perdamaian resmi ditandatangani oleh kedua negara. Perpindahan kepemilikan atas Kuril Selatan tidak pernah terjadi karena Jepang, dipengaruhi oleh Amerika Serikat yang menduduki Okinawa, menolak menandatangani perjanjian damai. Amerika Serikat memperingatkan Jepang agar tidak menerima tawaran tersebut, dengan anggapan bahwa seluruh wilayah Kuril Selatan, termasuk Shikotan dan Habomai, seharusnya memang sudah menjadi milik Jepang (Zolotaryova & Yessengaliyeva, 2013:274).

Pada tahun 1960, setelah tidak adanya kemajuan dalam perjanjian perdamaian, Soviet menyatakan kekhawatiran tentang kehadiran pasukan asing di Jepang, yang dianggap menghambat proses perdamaian. Jepang berargumen bahwa keberadaan pasukan asing telah ada sejak Deklarasi Bersama dan sudah dianggap sebagai situasi yang dapat diterima, sehingga Soviet tidak boleh menjadikan pengusiran pasukan asing sebagai syarat untuk pengembalian Pulau Shikotan dan Habomai. Selain itu, Jepang menyatakan tekadnya untuk mempertahankan kepemilikan tidak hanya atas Pulau Shikotan dan Habomai, tetapi juga atas seluruh Kuril Selatan, yang kemudian disebut sebagai Northern Territories (Ministry of Foreign Affairs of Japan, 2001).

Kemajuan atas negosiasi terkait sengketa wilayah antara Rusia dan Jepang dapat dilihat pada tahun 1991, setelah runtuhnya Uni Soviet. Boris Yeltsin, Presiden pertama Rusia, mengusulkan ide untuk menjual Kuril Selatan kepada Jepang. Yeltsin merencanakan lima langkah, termasuk mengakui klaim Jepang atas wilayah tersebut, demiliterisasi pulau yang diduduki Rusia, memberikan bebas visa bagi warga Jepang, menandatangani perjanjian perdamaian, dan pengenalan status baru Kepulauan Kuril Selatan, namun, rencana tersebut terhenti dan tidak membuahkan penandatanganan perjanjian karena Yeltsin digantikan oleh Vladimir Putin sebagai Presiden pada tahun 1999 yang menyatakan bahwa tidak akan menyerahkan Kuril Selatan (Orttung et al., 2007).

Pada tahun 2005, terjadi *Joint-Statement* antara Jepang dan Amerika Serikat. Salah satu tujuannya adalah untuk memperkuat kerjasama keamanan antara kedua negara, khususnya di wilayah Asia-Pasifik. Dalam Joint Statement tersebut, khususnya pada poin ke-10 menyatakan bahwa Amerika Serikat dan Jepang berkomitmen untuk mencari solusi atas sengketa wilayah Kuril Selatan dengan Rusia untuk memajukan normalisasi hubungan mereka (Ministry of Foreign Affairs of Japan, 2005). Pasca pertemuan Jepang dan Amerika Serikat, Rusia menghentikan pembicaraan dengan Jepang mengenai pipa gas yang direncanakan untuk dibangun bersama dan beralih untuk bekerja sama dengan Cina dan membuat Proyek Siberia (Saifuddin, 2021).

Negosiasi terkait Kuril Selatan kembali mengalami kemunduran pada saat Rusia melakukan pelatihan militer di pulau-pulau tersebut yang kemudian mendapat protes oleh pemerintah dan masyarakat Jepang pada tahun 2011 yang menganggap bahwa Kuril Selatan merupakan bagian dari mereka (The Moscow Times, 2011). Shinzo Abe yang menjabat sebagai PM Jepang pada 2012 kemudian menyatakan akan lebih proaktif dalam upaya mengembalikan Kuril Selatan, namun tetap menggunakan cara damai berdasarkan pasal 9 konstitusi Jepang yang meniadakan cara kekerasan dalam konflik. Hubungan kedua negara kemudian membaik yang dibuktikan dengan adanya kerjasama ekonomi seperti investasi di bidang manufaktur kendaraan, perencanaan kota, dan lain-lain (Strelsov, 2013).

Kemunduran mengenai negosiasi Kuril Selatan kembali terjadi setelah adanya penyerangan Rusia terhadap Ukraina pada tahun 2014 dan 2022. Pada penyerangan pertama, Jepang bersama dengan G7 memberi sanksi ringan yang hanya tertuju pada individu, hal ini dilakukan dalam rangka menjaga hubungan bilateral dengan Rusia (Kitade, 2016). Hubungan kedua negara masih tetap berjalan dengan baik yang bahkan mendapat demonstrasi dari masyarakat Rusia pada tahun 2019. Masyarakat menganggap bahwa Rusia akan menyerahkan Kuril kepada Jepang, namun pada saat penyerangan kedua di tahun 2022, Jepang memberikan sanksi yang lebih berat ketimbang sebelumnya seperti penghentian ekspor peralatan pengeboran minyak. Berbeda dengan tahun 2014, sanksi terbaru Jepang dianggap sebagai tindakan Anti-Russia dan dinilai tidak bersahabat, sebagai akibatnya hubungan bilateral kedua negara memburuk dan negosiasi atas perjanjian damai dan Kepulauan Kuril Selatan terhenti.

Resolusi Konflik Kuril Selatan

Berdasarkan informasi yang telah disampaikan sebelumnya, terdapat upaya-upaya untuk menyelesaikan sengketa wilayah antara Rusia dan Jepang. Pada bagian ini, akan dibahas faktor-faktor yang menghambat penyelesaian konflik, dengan mengacu pada peristiwa-peristiwa sebelum dan setelah Perang Dunia II, menggunakan konsep hambatan dari Teori Resolusi Konflik. Hambatan dalam resolusi konflik juga dapat dilihat dari Kondisi Objektif pada *State Level* dan Kondisi Subjektif pada *Community Level*.

a. Hambatan Resolusi Konflik

Resolusi Konflik memiliki dua komponen penting, yaitu metode dan hambatan. Terdapat dua jenis cara yang telah ditempuh dalam penyelesaian sengketa Kuril Selatan, yang pertama adalah cara kekerasan, dimana telah dilakukan pada tahun 1805 dan 1945. Metode ini dinilai tidak efektif karena permasalahan sengketa wilayah tetap berjalan. Kemudian cara-cara damai juga dilakukan kedua negara. Merrills menyatakan bahwa Resolusi Konflik melalui cara damai terbagi dua, yaitu diplomasi dan arbitrase. Rusia

dan Jepang telah melakukan upaya diplomasi tanpa pihak ketiga sebagai penengah, seperti yang terjadi pada Perjanjian Shimoda 1855 dan Deklarasi Bersama tahun 1956.

Baik cara damai dan kekerasan yang dilakukan tetap tidak dapat menyelesaikan konflik sengketa wilayah perbatasan Kepulauan Kuril. Untuk itu, sengketa wilayah Kuril akan dilihat melalui Hambatan pada Resolusi Konflik. Adolf Huala menegaskan bahwa suatu konflik dapat diselesaikan dengan melibatkan pihak yang dapat memberikan putusan mengikat, namun karena Jepang dan Rusia tidak pernah membawa persoalan ini ke badan arbitrase, maka tidak ada putusan mengenai sengketa wilayah dan menjadi salah satu faktor tidak terselesaikannya konflik Kuril.

Tidak ada partisipasi lembaga arbitrase tidak berarti menghapuskan peran pihak ketiga dalam sengketa Kuril Selatan antara Jepang dan Rusia. Sejarah menunjukkan bahwa kehadiran pihak lain dalam sengketa Kuril dipandang hanya menguntungkan satu pihak dan ditolak oleh pihak lain karena dianggap merugikan dan menghalangi penyelesaian masalah Kuril. Contohnya adalah Deklarasi Bersama tahun 1956 dan protes Rusia tahun 1960, di mana Amerika Serikat dianggap sebagai pengganggu dalam upaya perdamaian antara Rusia dan Jepang, yang menghambat tercapainya perjanjian perdamaian. Selain itu, kerjasama keamanan di wilayah Pasifik antara Jepang dan Amerika Serikat mendorong Rusia untuk memindahkan pembangunan pipa gas yang sedang dibahas dengan Jepang ke Cina. Ini menunjukkan keengganan Rusia untuk diintervensi terkait masalahnya dengan Jepang.

Pada tahun 2014 dan 2022, saat Rusia melakukan invasi terhadap Ukraina, Jepang sebagai anggota G7 memberlakukan sanksi sebagai upaya untuk mendukung perdamaian dan ketertiban internasional, yang berdampak pada penghentian proses pembuatan perjanjian perdamaian dan penyerahan Kuril Selatan. Ini menunjukkan bahwa pihak ketiga, khususnya G7 yang mementingkan perdamaian, mengharuskan anggotanya untuk bertindak searah. Awalnya, Jepang memberlakukan sanksi yang ringan untuk menjaga hubungan bilateral dengan Rusia, tetapi pada tahun 2022, Jepang bersama anggota G7 memberlakukan sanksi yang tambahan yang mengakibatkan memburuknya hubungan bilateral kedua negara dan menyebabkan pernyataan penghentian upaya damai dari masing-masing pihak.

Dari uraian-uraian diatas telah ditemukan dua faktor penghambat resolusi konflik Kuril Selatan, yaitu tidak diajukannya permasalahan sengketa ke badan arbitrase untuk mendapat putusan yang mengikat dan terdapat pihak ketiga yang dianggap memperlambat penyelesaian konflik. Selain dua faktor yang telah disebutkan sebelumnya, terdapat faktor-faktor lain yang ditemukan dalam sengketa dan resolusi konflik Kepulauan Kuril baik sebelum maupun setelah Perang Dunia II, yang diidentifikasi melalui Kondisi Objektif dan Subjektif dari kedua negara yang terlibat, seperti yang terdokumentasikan dalam tabel dibawah.

b. Kondisi Objektif dan Subjektif

Tabel 1. Kondisi Objektif dan Subjektif

	Rusia	Jepang
Objektif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kedaulatan Kuril berdasar perjanjian Yalta tahun 1945 2. Rusia berkeinginan mempertahankan Sumber Daya Alam yang diperoleh di Kuril Selatan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kedaulatan berdasarkan perjanjian Shimoda tahun 1855 2. Memprioritaskan ikut menjaga keamanan internasional sebagai anggota G7
Subjektif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penolakan penyerahan Kuril Selatan oleh masyarakat karna telah dianggap menjadi bagian Rusia sejak Perang Dunia II 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Masyarakat menganggap Kuril Selatan sebagai bagian dari mereka jauh sebelum Perang Dunia II

Sumber: Diolah oleh Penulis

Dari tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa jika diamati pada *State Level*, dasar klaim atas Kuril Selatan berbeda antara Rusia dan Jepang. Rusia menggunakan Perjanjian Yalta 1945, yang disepakati oleh Pasukan Sekutu selama Perang Dunia II tanpa keterlibatan Jepang, sebagai dasar klaimnya. Sementara itu, Jepang mengacu pada Perjanjian Shimoda 1855, di mana Rusia pada saat itu mengakui Kuril Selatan sebagai bagian dari wilayah Jepang. Kondisi objektif menunjukkan bahwa negara-negara menganggap kepentingan nasional dan kedaulatan wilayah sebagai hal yang tidak dapat diganggu gugat, seperti sikap Rusia yang mempertahankan kepemilikan atas Etorofu, Kunashiri, Shikotan, dan Habomai sejak Perang Dunia II dengan merujuk pada Perjanjian Yalta. Terlepas dari bagaimana wilayah tersebut diperoleh, Kuril Selatan telah menjadi bagian dari kedaulatan Rusia. Negara-negara dengan kondisi objektif yang berbeda akan memandang kepentingan mereka sebagai hal yang mutlak, yang sering kali mengarah pada konflik antara negara-negara tersebut.

Dilihat dari perspektif ekonomi, Johan Galtung menyebutkan bahwa pada Kondisi Objektif, sumber daya alam sering kali menjadi penyebab konflik antar negara dan menjadi penghalang dalam penyelesaian konflik. Dalam tabel Kondisi Objektif, Rusia ditemukan memiliki keinginan untuk mempertahankan sumber daya alam yang ada di Kuril Selatan. Dengan menguasai Kuril Selatan, Rusia secara otomatis menjadi pemilik sumber daya alam dan juga infrastruktur yang ditinggalkan oleh Jepang. Rusia melaksanakan latihan militer di wilayah yang menjadi sengketa, meskipun tindakan ini mendapat protes dari Jepang. Semua ini menunjukkan upaya pengelolaan wilayah setelah pengambilalihan, yang menjadi alasan bagi Rusia untuk tidak mengembalikan kepemilikan Kuril Selatan.

Sejak Deklarasi Bersama, Jepang terus berusaha untuk mendapatkan kembali kepemilikan Kuril Selatan, tetapi Rusia tetap menolak klaim tersebut. Pada tahun 2014, Rusia menyerang Ukraina, dan sebagai anggota G7, Jepang memberikan sanksi kepada Rusia sebagai responsnya. Sanksi tersebut terhitung ringan dan tidak berdampak besar pada perekonomian Rusia, yang membuat Rusia tidak melakukan tindakan balasan. Namun, pada serangan kedua pada tahun 2022, situasi serupa terulang kembali, dan Rusia menghentikan kerjasama bilateral dengan Jepang sebagai tanggapannya. Jepang

mengambil tindakan memberikan sanksi sebagai bagian dari partisipasinya dalam menjaga keamanan internasional. Tindakan ini juga sesuai dengan Pasal 9 Konstitusi Jepang yang menegaskan penolakan terhadap penggunaan kekuatan militer untuk menyelesaikan konflik dan mengedepankan penyelesaian masalah melalui jalur damai, selain itu, keputusan untuk mendukung ketertiban internasional juga didasarkan pada pernyataan dari Menteri Luar Negeri Jepang pada tahun 2022, yang beranggapan bahwa karena adanya serangan terhadap Ukraina, maka Jepang tidak sedang dalam keadaan untuk membicarakan mengenai perjanjian perdamaian dengan Rusia sehingga proses perpindahan kepemilikan wilayah perbatasan Kuril Selatan terhenti. Oleh karena itu, keikutsertaan Jepang dalam menjaga ketertiban internasional menghambat penyelesaian sengketa Kuril.

Pada *Community Level*, kedua masyarakat di Rusia dan Jepang menganggap Kuril Selatan sebagai bagian dari wilayah mereka, yang kemudian menjadi faktor penghambat dalam penyelesaian sengketa wilayah. Hal ini tercermin dalam demonstrasi yang terjadi di kedua negara. Di Rusia, protes masyarakat terjadi pada tahun 2019. Masyarakat mengkhawatirkan bahwa pemerintah akan menyerahkan Kuril Selatan jika Jepang mengakui kedaulatan Rusia, sesuai dengan isi Deklarasi Bersama yang berjanji penyerahan wilayah kepada Jepang setelah perjanjian perdamaian. Protes masyarakat menunjukkan ketidaksetujuan terhadap penyerahan wilayah dan menandakan ketidaksepahaman antara pemerintah dan rakyat. Dalam konteks subjektif, sejarah, wilayah, dan sumber daya alam diidentifikasi sebagai sumber konflik, menjadikan pentingnya kebijakan pemerintah dalam mengelola ketiga hal tersebut untuk mencegah konflik yang lebih besar.

Di Jepang juga terjadi demonstrasi pada *Community Level* yang terkait dengan sengketa Kuril Selatan. Berbeda dengan masyarakat Rusia yang mengkritik pemerintah mereka untuk mempertahankan Kuril Selatan, masyarakat Jepang justru melakukan unjuk rasa terhadap Rusia. Mereka menuntut agar Rusia mengembalikan *Northern Territories* yang diambil secara paksa selama Perang Dunia II. Secara historis, Kuril Selatan telah menjadi bagian dari mereka sejak tahun 1700-an. Unjuk rasa ini merupakan upaya untuk melindungi identitas mereka, karena wilayah yang telah lama menjadi bagian dari Jepang kemudian dikuasai oleh pihak asing. Dalam konteks subjektif, konflik antara pemerintah dan masyarakat biasanya terjadi di dalam satu negara, namun dalam kasus Jepang dan Rusia, masyarakat memiliki ketidaksetujuan terhadap tindakan negara lain (Rusia) yang kemudian diwakili oleh pemerintah dari negara asal masyarakat tersebut, yaitu Jepang, untuk menyuarakan ketidakpuasan mereka terhadap masalah Kuril Selatan.

Kesimpulan

Sengketa wilayah Kepulauan Kuril Selatan yang telah berjalan antara Jepang dan Rusia telah beralih ke pendekatan diplomatik bilateral dan tidak lagi menggunakan kekuatan militer seperti pada masa Perang Dunia II dan upaya-upaya untuk menyelesaikan sengketa masih belum berhasil hingga tahun 2022. Penyebab utama dari kegagalan ini adalah absennya lembaga arbitrase yang dapat mengeluarkan keputusan yang mengikat bagi kedua negara, campur tangan pihak ketiga yang bias, seperti AS yang mempengaruhi Jepang melalui Deklarasi Bersama tahun 1956, perbedaan dasar klaim antara kedua negara, ketidaksepakatan mengenai kepentingan nasional dimana Rusia ingin menguasai SDA, sedangkan Jepang ingin menjaga keamanan internasional

melalui sanksi yang diberlakukan, dan juga adanya klaim kepemilikan atas Kuril oleh masyarakat di masing-masing negara.

Secara keseluruhan, baik pemerintah maupun masyarakat dari kedua negara mengakui klaim kepemilikan mereka terhadap empat pulau Kuril ini, yang kemudian menjadi penghambat dalam upaya resolusi konflik karena berbagai faktor-faktor yang telah disebutkan sebelumnya.

Daftar Pustaka

- Aji, M. Prakoso dan Jerry Indrawan. 2019. "*Understanding Peace Studies As Part of International Relations*". Jakarta : Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.
- Brown, James D. J. 2016. *Japan, Russia, and their Territorial Dispute: The Northern Delusion*. New York: Routledge.
- CVCE. 2015. *Protocol of Proceedings at the Yalta Conference 1945*. https://www.cvce.eu/en/obj/protocol_of_proceedings_at_the_yalta_conference_1_1_february_1945-en-0ef9e6d6-17a2-480d-864e-992d5558c520.html (diakses 27 April 2024).
- Emmers, Ralf. 2010. *Geopolitics and Maritime Territorial Disputes in East Asia*. New York: Routledge.
- Evans, Malcolm. 2003. *International Law*. Great Britain: Oxford University Press.
- Gent, Stephen E. dan Megan Shannon. 2011. "Bias and the effectiveness of third-party conflict management mechanisms". *Conflict Management and Peace Science* : 124-144.
- Huala, A. (2020). *Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional* (Tarmizi (ed.); Edisi Revi). Sinar Grafika.
- Ihsan. 2014. "Peran Uni Afrika Dalam Resolusi Konflik Darfur Tahun 2004-2007". Jakarta : Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.
- Jeong, Ho Won. 2010. *Conflict Management and Resolution: An Introduction*. New York: Routledge.
- Jukes, Geoffrey. 2002. *The Russo-Japanese War 1904-1905*. Oxford: Osprey.
- Kitade, Daisuke. 2016. *Considering The Effects of Japanese Sanctions Against Russia*. https://www.mitsui.com/mgssi/en/report/detail/1221522_10744.html (diakses 28 April 2024).
- Knoop, Klaas D. 2014. "The Third Party in Conflict Resolution: As Facilitator, Mediator or Arbitrator". Berlin : Institut für Strategie- Politik- Sicherheits- und Wirtschaftsberatung.
- Kurilsky Nature Reserve. 2006. *History of the Kuril Islands discovery*. <https://kurilskiy.ru/local-history-en> (diakses 27 April 2024).
- Ministry of Foreign Affairs of Japan. 2001. *Joint Compendium of Documents on the History of Territorial Issues between Japan and Russia*. <https://www.mofa.go.jp/region/europe/russia/territory/edition92/index.html> (diakses 27 April 2024)
- Ministry of Foreign Affairs of Japan. 2005. *Joint Statement*. Washington DC: U.S.- Japan Security Consultative Committee
- Ministry of Foreign Affairs of Japan. 2022. *Japanese Territory*. https://www.mofa.go.jp/erp/rss/northern/page1we_000017.html (diakses 27 April 2024).

- Orttung, Robert, dkk (Eds). 2007. *Russia's Foreign Policy: Key Regions and Issues*. Bremen : Research Centre for East European Studies.
- Presidential Library. 2024. *Treaty of 1875 Between Russia and Japan on Territories Exchange*. <https://www.prlib.ru/en/history/619225> (diakses 27 April 2024)
- Rapry, Alfian Septiana. 2014. "*Kepentingan Rusia dalam Proyek Sakhalin I dengan Jepang tahun 1996-2003*". Jakarta : Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.
- Hamzah, Saifuddin. 2021. "*Strategi Jepang Dalam Sengketa Kepulauan Kuril Selatan Menghadapi Rusia Pada Masa Pemerintahan Shinzo Abe*". Jakarta : Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.
- Strelsov, Dmitri. 2013. *Japanese Prime Minister Abe's visit to Russia*. <https://eastasiaforum.org/2013/05/15/japanese-prime-minister-abes-visit-to-russia/> (diakses 28 April 2024).
- The Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation. 2022. *Foreign Ministry statement on measures in response to the decisions of the Government of Japan*. https://mid.ru/en/foreign_policy/news/1805541/ (diakses 26 Juni 2023).
- The Moscow Times. 2011. *Japan Rally for Return of Kurils*. <https://www.themoscowtimes.com/2011/02/07/japanese-rally-for-return-of-kurils-a4808> (diakses 28 April 2024).
- Zolotaryova dan Yessengaliyeva. 2013. "*Dispute Between Russia and Japan Concerning Kuril Islands*". Astana : L.N. Gumilyov Eurasian National University